



RELEVANSI KEBIJAKAN BANSOS PADA KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA SELAMA PANDEMI COVID-19

Faisal Labib Zulfihar¹, Muhammad Ilham Maulana², Ali Abrori³

^{1,2} Kementerian Keuangan

³ Bapenda DKI Jakarta

¹Alamat Korespondensi: faisal.labib@kemenkeu.go.id

INFORMASI ARTIKEL

Submission
07-06-2024

Accepted
19-11-2024

KATA KUNCI:
Social Spending, State Spending, Covid-19 Pandemic.

KLASIFIKASI JEL:
H72, H75

ABSTRACT

Sumatra Island contributes 23% of Indonesia's GDP but has been among the regions most severely impacted by the COVID-19 pandemic. Both central and local governments have distributed social assistance to mitigate these effects; however, such assistance's benefits remain debatable. This study aims to examine the impact of the COVID-19 pandemic on economic growth and assess how social protection spending moderates this relationship in Sumatra. Additionally, related variables such as education and health expenditures are analyzed. The research employs a quantitative approach using Moderated Regression Analysis (MRA) on 544 year-sample data points from 136 regencies/cities in Sumatra from 2018 to 2021. The findings reveal that the COVID-19 pandemic significantly and negatively affects economic growth. Social protection spending has a significant positive effect on economic growth, while education and health expenditures do not show a significant impact. Furthermore, the interaction between social protection spending and the COVID-19 pandemic yields a significant positive effect.

Pulau Sumatera menyumbang 23% dari total PDB Indonesia namun terdampak parah oleh Pandemi Covid-19. Pemerintah pusat dan daerah menyalurkan bantuan sosial, tetapi manfaatnya masih diperdebatkan. Penelitian ini mengkaji dampak Pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi dan peran belanja perlindungan sosial sebagai moderasi, serta mengevaluasi belanja pendidikan dan kesehatan. Metode yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA) dengan data 544 sampel-tahun dari 136 kabupaten/kota di Sumatera (2018–2021). Hasilnya, Pandemi Covid-19 berdampak negatif signifikan pada pertumbuhan ekonomi, belanja perlindungan sosial berdampak positif signifikan, sedangkan belanja pendidikan dan kesehatan tidak signifikan. Penelitian ini menjadi salah satu di Indonesia yang mengeksplorasi peran belanja perlindungan sosial dalam moderasi dampak pandemi terhadap ekonomi pada tingkat regional.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif di berbagai sendi kehidupan, termasuk di bidang ekonomi pada tingkat nasional dan daerah. Hal tersebut tergambar dari merosotnya pendapatan daerah, menurunnya daya beli, dan berkurangnya konsumsi bahan pokok oleh masyarakat (Wu et al., 2021). Wabah yang melanda dunia selama hampir tiga tahun tersebut juga menyebabkan krisis fasilitas kesehatan, baik di pusat maupun di daerah, yang pada akhirnya membatasi efisiensi tenaga kesehatan. Campur tangan pemerintah penting untuk dilakukan, khususnya dalam memitigasi dampak Pandemi Covid-19 di daerah (Anderson et al., 2020). Hal tersebut mengingat kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada dua hal, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia berkontribusi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap laju pertumbuhan produk domestik bruto (Ferdiansah, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa dengan semakin parahnya penyebaran wabah Covid-19, menyebabkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) semakin diperketat. Akibatnya, aktivitas ekonomi berbagai sektor ekonomi, termasuk di dalamnya transportasi, akomodasi, restoran, dan perdagangan secara umum, terhenti (Dube et al., 2021). Ekonomi pun mengalami kontraksi, dan apabila tidak segera dimitigasi, ekonomi di tingkat nasional dan daerah akan masuk ke lingkaran setan dan ambruk. Dalam kacamata fiskal, Pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada keuangan daerah, ditandai dengan menurunnya pendapatan asli daerah, meningkatnya ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat, serta berkurangnya kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya (Sofi et al., 2022).

Salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam memitigasi dan menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat adalah dengan memanfaatkan instrumen fiskal, yaitu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Penelitian menunjukkan bahwa

restrukturisasi dan realokasi anggaran terbukti mampu menanggulangi dampak negatif dari Pandemi Covid-19 (Putri et al., 2023). Usaha tersebut meliputi upaya pemerintah dalam revisi anggaran, penerapan kebijakan untuk pemulihan ekonomi, serta penguatan belanja di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Belanja di bidang perlindungan sosial, seperti pemberian uang tunai dan penyaluran barang kebutuhan pokok, menjadi salah satu kebijakan utama pemerintah selama Pandemi Covid-19 (Sumadi, 2023). Pemberian bantuan sosial tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pembatasan aktivitas, termasuk di dalamnya pada bidang ekonomi, bagi masyarakat yang rentan.

Pulau Sumatera, sebagai pulau terbesar kedua di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk, dihuni oleh lebih dari 60 juta jiwa. Angka tersebut setara dengan 22% dari total penduduk Indonesia. Pulau ini berkontribusi sekitar 23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2023. Namun, selama Pandemi Covid-19, perekonomian Sumatera juga mengalami dampak yang signifikan (Akita & Alisjahbana, 2023). Pandemi ini menyebabkan kontraksi PDRB di wilayah Sumatera, disertai peningkatan pengangguran, inflasi, dan gangguan pada sektor-sektor utama seperti perkebunan, transportasi, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Liyushiana et al., 2022). Sebagai langkah mitigasi, pemerintah pusat dan daerah di Sumatera secara aktif menyalurkan bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Namun, manfaat dari pemberian bantuan sosial melalui belanja perlindungan sosial tersebut tidak terlepas dari pro dan kontra, utamanya terkait dengan efektivitas dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 dan transparansi publik (Juwita, 2023). Permasalahan seperti ketidaktepatan penerima bantuan sosial serta berbagai hambatan di tingkat daerah mengindikasikan pentingnya peran desentralisasi untuk meningkatkan penyaluran bantuan sosial di negara berkembang (Lind et al., 2021). Hal tersebut karena bantuan sosial yang berasal dari belanja perlindungan sosial yang efisien dan efektif akan menghasilkan manfaat yang memadai ketika terjadi krisis, seperti pengurangan pendapatan hingga pengurangan tenaga kerja.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi telah diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian Ashraf (2020) menemukan bahwa Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi pada 77 negara yang menjadi objek penelitiannya. Zhang et al. (2021) menemukan hal yang sama dimana Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan daya beli serta performa dunia industri di 36 negara yang diamati. Di Indonesia, Iskari et al. (2021) menemukan bahwa penerapan PSBB di Jakarta berdampak negatif terhadap pekerja informal. Selaras dengan hal tersebut, Ridwan (2023) menemukan bahwa pembatasan sosial di masa Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada perekonomian Kota Depok, terutama di sektor UMKM dan pariwisata yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya juga mencoba untuk mengungkap pengaruh belanja perlindungan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, sampai dengan saat ini, masih sedikit literatur yang meneliti pengaruh moderasi belanja daerah perlindungan sosial terhadap dampak pandemi Covid-19 pada pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia. Dalam kaitannya dengan Pandemi Covid-19, Penelitian di Vietnam mengungkapkan bahwa belanja perlindungan sosial dapat mengurangi dampak pandemi secara signifikan (Nguyen & Bui, 2022). Lustig et al. (2023) di Amerika Latin menemukan bahwa dampak Pandemi Covid-19 terhadap masyarakat yang rentan secara ekonomi signifikan. Namun, dengan adanya belanja perlindungan sosial, dapat memitigasi dampak tersebut, terutama di Brazil dan Argentina. Zweig et al. (2021) dimana implementasi kebijakan bantuan sosial yang baik, dapat memitigasi dampak Pandemi Covid-19 di Amerika Serikat, Vietnam, hingga Ethiopia.

Namun demikian, beberapa penelitian lain menghasilkan temuan yang bertolak belakang. Kim (2021) misalnya, menemukan bahwa belanja perlindungan sosial yang dianggarkan tidak dapat menanggulangi kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat selama Pandemi Covid-19. Selain itu, Pangaribowo et al. (2022) menemukan bahwa dampak belanja bantuan sosial masih belum jelas manfaatnya.

Merujuk kepada uraian sebelumnya, diketahui bahwa penelitian mengenai dampak Pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia masih sedikit. Selain itu, belum ada penelitian yang menguji pengaruh moderasi belanja perlindungan sosial terhadap dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini mencoba untuk menguji bagaimana dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, khususnya di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Selain itu, diuji juga apakah belanja daerah terkait perlindungan sosial yang didorong ketika Pandemi Covid-19 mampu mengurangi dampak Pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Pulau Sumatera.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Peningkatan atau kenaikan yang stabil dalam output atau pendapatan aktual suatu negara disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diyakini dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Perspektif klasik Solow dan Swan menempatkan penekanan kuat pada nilai tenaga kerja, modal, dan teknologi. Sementara itu, teori pertumbuhan endogen Romer dan Lucas Jr. menyoroti bagaimana inovasi, R&D, dan pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi (Kustanto, 2020). Menurut hipotesis ini, pendanaan pendidikan sangat penting untuk mendorong kemakmuran ekonomi jangka panjang. Menurut teori lain, Teori Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, pembangunan ekonomi memperhitungkan keberlanjutan sosial dan lingkungan selain skala ekonomi (Ditya et al., 2017)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu metrik yang sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Alat ini dikenal sebagai Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Total produksi barang dan jasa suatu wilayah dirangkum dalam bentuk produk regional bruto (PDRB). Salah satu metrik penting untuk mengevaluasi efektivitas inisiatif pembangunan suatu wilayah adalah tingkat pertumbuhan PDB. Semua produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen, termasuk

keluarga, bisnis, pemerintah, dan pihak asing, dijumlahkan untuk menentukan produk nasional bruto (PDRB) (Andiojaya et al., 2022).

Baik ekonomi global maupun kesehatan telah terdampak oleh bencana yang disebut pandemi Covid-19. Ekonomi global menyusut sebesar 6% sejak dimulainya pandemi pada tahun 2020 (Ajami, 2020). Pertumbuhan ekonomi telah terdampak negatif oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan oleh Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia (Pradesha et al., 2020).

Penelitian Ashraf (2020) menemukan bahwa Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi pada 77 negara yang menjadi objek penelitiannya. Meskipun negara-negara tersebut telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk menanggulangi pandemi, namun pembatasan aktivitas berdampak buruk terhadap kinerja ekonomi. Salah satunya terlihat dari performa pasar saham di negara-negara tersebut. Penelitian Zhang et al. (2021) menemukan hal yang sama. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan daya beli serta performa dunia industri di 36 negara yang diamati. Penelitian Elnahass et al. (2021) memperkuat temuan tersebut dimana Pandemi Covid-19 mengancam stabilitas industri perbankan di 116 negara yang menjadi objek pengamatan.

Dampak Pandemi Covid-19 juga ditemukan di Thailand dan Malaysia. Sebuah penelitian oleh Osterrieder et al. (2021) menemukan bahwa Pandemi Covid-19 menyebabkan masalah ekonomi bagi mereka yang rentan, terutama bagi pekerja muda berpenghasilan rendah. Wu et al. (2021) menemukan hal serupa di China. Pandemi Covid-19 berdampak negatif terutama di industri sektor jasa dan manufaktur.

Sementara di Indonesia, Iskar et al. (2021) menemukan bahwa penerapan PSBB di Jakarta berdampak negatif terhadap pekerja informal. Hal tersebut karena PSBB menghilangkan mata pencaharian pekerja di sektor tersebut dan memaksa banyak bisnis gulung tikar. Sementara itu, Ridwan (2023) menemukan bahwa pembatasan sosial di masa Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada perekonomian Kota Depok, terutama di sektor UMKM

dan pariwisata yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat.

Merujuk pada uraian di atas, belum ada penelitian yang menganalisis dampak Pandemi Covid-19 pada tingkat Kabupaten/Kota secara luas. Maka, berdasarkan hal tersebut, hipotesis pertama dari penelitian ini sebagai berikut:

H1: *Pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan terdampak apabila pemerintah melakukan intervensi terhadap konsumsi komoditas atau jasa yang menjadi komponen PDRB (Puji Lestari & Yolanda, 2022). Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, untuk menggunakan instrumen fiskal, khususnya APBD, guna meredam dampak pandemi COVID-19 (Yushkov & Alexeev, 2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) muncul sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sejak masa reformasi, yaitu saat otonomi daerah mulai diterapkan. Menurut Ma & Mao (2018), menyatakan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebutuhan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Belanja perlindungan sosial merupakan salah satu dari enam kategori belanja yang paling banyak mendapat perhatian. Belanja perlindungan sosial membantu masyarakat untuk bersiap menghadapi guncangan, terutama bagi mereka yang termasuk dalam kategori rentan (Osabohien et al., 2022). Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, Program Perlindungan Sosial, dan Program Perlindungan Sosial selama pandemi COVID-19 merupakan beberapa bentuk belanja perlindungan sosial tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar, dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional merupakan contoh program bantuan sosial yang memberikan bantuan tanpa mengharuskan adanya iuran. Sementara itu, program jaminan sosial, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kesehatan Nasional, merupakan program bantuan yang menerima iuran.

Dampak epidemi Covid-19 khususnya dan belanja pemerintah, khususnya belanja perlindungan sosial, terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi subjek beberapa penelitian sebelumnya. Akan tetapi, saat ini belum ada penelitian yang mengkaji bagaimana belanja perlindungan sosial memengaruhi hubungan antara pandemi COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Indonesia. Pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pengeluaran perlindungan sosial, seperti subsidi pengasuhan anak, menurut penelitian (Järnberg & Värja, 2023).

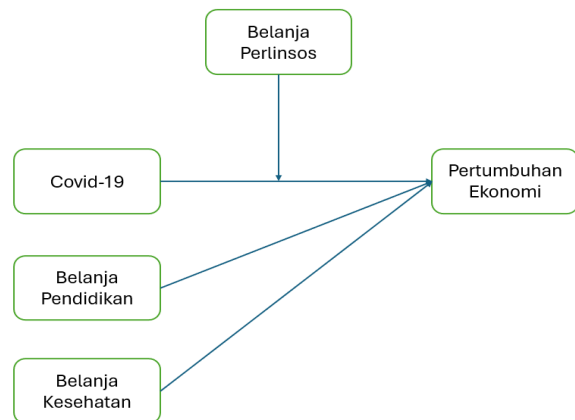
Penelitian tentang pandemi Covid-19 di Vietnam mengungkapkan bahwa belanja perlindungan sosial dapat mengurangi dampak pandemi secara signifikan (Nguyen & Bui, 2022). Penelitian Lustig (2023) di Amerika Latin menemukan bahwa dampak Pandemi Covid-19 terhadap masyarakat yang rentan secara ekonomi signifikan. Namun, dengan adanya belanja perlindungan sosial, dampak memitigasi dampak tersebut, terutama di Brazil dan Argentina. Hasil serupa ditemukan dalam penelitian Zweig et al. (2021) dimana implementasi kebijakan bantuan sosial yang baik, dapat memitigasi dampak Pandemi Covid-19 di Amerika Serikat, Vietnam, hingga Ethiopia.

Namun demikian, beberapa penelitian lain menghasilkan temuan yang bertolak belakang. Kim (2020) misalnya, menemukan bahwa belanja perlindungan sosial yang dianggarkan tidak dapat menanggulangi kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat selama Pandemi Covid-19. Selain itu, Pangaribowo et al. (2022) menemukan bahwa dampak belanja bantuan sosial masih belum jelas manfaatnya.

Merujuk pada uraian di atas, penelitian terkait dampak Pandemi Covid-19 serta mitigasi kebijakan di level daerah masih terbatas. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam hasil pengaruh belanja bantuan sosial terhadap dampak Pandemi Covid-19. Untuk itu, dengan mengacu pada uraian sebelumnya, hipotesis kedua penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:
H2: *Belanja Perlindungan Sosial pada APBD Kabupaten/Kota mampu memoderasi pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Sampel



Sampel dari penelitian ini merupakan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam kurun waktu 2018 s.d. 2021. Penggunaan sampel dimulai pada tahun 2018 dan berakhir pada tahun 2021 karena meliputi dua tahun sebelum dan dua tahun saat Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Badan Pusat Statistik serta Laporan Non-Publik yang dimintakan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Kabupaten/Kota yang tidak memiliki data lengkap pada kurun waktu pengamatan dikeluarkan dari sampel penelitian. Sampel akhir dari penelitian ini terdiri dari 136 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam kurun waktu empat tahun, sehingga menghasilkan 544 sampel-tahun pengamatan.

3.2 Model Pengujian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengujian dilakukan dengan Regresi Data Panel menggunakan Stata 17. Pengujian terdiri dari uji statistik deskriptif, uji pemilihan model, dan uji hipotesis. Regresi data panel dilakukan untuk menguji pengaruh Pandemi Covid-19 dan jenis belanja menurut fungsi pada APBD di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera terhadap Pertumbuhan Ekonomi, serta bagaimana belanja perlindungan sosial di APBD di Pulau Sumatera dapat memoderasi hubungan tersebut. Variabel Dependen dari Penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi. Merujuk pada penelitian (Järnberg & Värja, 2023) pertumbuhan ekonomi diprosikan dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) untuk setiap kabupaten/kota.

Sementara itu, variabel independen yang akan diuji adalah Pandemi Covid-19 serta jenis belanja menurut fungsi yang ada di APBD Kabupaten/Kota. Variabel Pandemi Covid-19 diukur dengan menggunakan variabel dummy untuk memudahkan penelitian. Untuk tahun-tahun sebelum Pandemi, maka diberikan nilai 0, sementara pada tahun-tahun ketika Pandemi berlangsung diberikan nilai 1. Hal ini sesuai dengan penelitian Bajary et al. (2023). Sementara belanja pemerintah diukur dengan menggunakan logaritma natural setiap jenis belanja daerah. Ada tiga jenis belanja Pemerintah Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai variabel independen.

Sumber: diolah Penulis (2024)

Pertama, yaitu Belanja Pendidikan, dengan asumsi belanja tersebut adalah belanja yang memiliki *minimum mandatory spending* sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), sehingga diharapkan adanya dampak yang signifikan (Syahputra et al., 2023). *Kedua*, Belanja Kesehatan dan Belanja Perlindungan Sosial (Juwita, 2023b) yang berkaitan erat dengan penanganan Pandemi Covid-19 (Coccia & Benati, 2023). Pada pengujian lanjutan, akan diuji pengaruh moderasi dari Belanja Perlindungan Sosial terhadap pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Tabel-1: Definisi Operasional Variabel

Variabel	Deskripsi	Sumber
PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota	Jarnberg & Varja (2023)
COVID-19	Dummy Variabel, 1 apabila APBD untuk tahun 2020 & 2021, dan 0 apabila untuk tahun 2018 & 2019	Bajary et al. (2023)
Kesehatan	Ln Belanja Kesehatan pada APBD Kabupaten/Kota	Devarajan et al. (1996) dan Jarnberg & Varja (2023)
Pendidikan	Ln Belanja Pendidikan pada APBD Kabupaten/Kota	
Sosial	Ln Belanja Perlindungan Sosial pada APBD Kabupaten/Kota	

Sumber: diolah Penulis (2024)

Merujuk kepada Uraian di atas, maka hipotesis dari penelitian ini diuji dengan persamaan berikut ini:

Persamaan 1:

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 COVID_{it} + \beta_2 Sosial_{it} + \beta_4 Kesehatan_{it} + \beta_5 Pendidikan_{it} + \epsilon$$

Persamaan 2:

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 COVID_{it} + \beta_3 Sosial \times COVID-19_{it} + \beta_4 Kesehatan_{it} + \beta_5 Pendidikan_{it} + \epsilon$$

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan PDRB pada 136 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam kurun waktu 4 tahun pengamatan sebesar 4,54%. Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,99% dalam kurun waktu

yang sama (BPS, 2024). Nilai standar deviasi sebesar 0,0024 yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa nilai laju pertumbuhan PDRB tidak terlalu berbeda antar Kabupaten/Kota di mana hal tersebut ditunjukkan dengan nilai minimum sebesar -26,37% dan nilai maksimum mencapai 30,11%.

Sementara itu, tabel 2 juga menunjukkan statistik deskriptif terhadap tiga jenis belanja daerah pada 136 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Belanja Pendidikan memiliki rata-rata sebesar Rp361 Miliar dengan standar deviasi Rp207 Miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara satu daerah dan daerah lain. Nilai minimum dari belanja pendidikan sebesar Rp55 Miliar sementara nilai maksimumnya sebesar Rp1.194 Miliar.

Pada belanja kesehatan, rata-rata selama empat tahun sebesar Rp207 Miliar dengan standar deviasi Rp100 Miliar. Nilai belanja kesehatan terkecil sebesar Rp40 Miliar sementara terbesarnya sebesar Rp 793 Miliar. Rata-rata untuk belanja perlindungan sosial sebesar Rp 18 Miliar dengan standar deviasi Rp11 Miliar. Nilai terendah belanja sosial sebesar Rp2 Miliar dan nilai tertinggi sebesar Rp 120 Miliar.

4.2 Uji Regresi

Uji pemilihan model dilakukan sebelum uji hipotesis untuk menentukan model yang paling sesuai diantara *common effect model (CEM)*, *fixed effect model (FEM)*, dan *random effect model (REM)*. Hasil pengujian melalui uji chow sebagaimana Tabel 3 menunjukkan nilai *prob.* sebesar $0,9993 > 0,05$ yang mengindikasikan bahwa model yang paling sesuai adalah antara *random effect model (REM)* atau *common effect model (CEM)* dibandingkan *fixed effect model (FEM)*. Untuk mengonfirmasi hal tersebut,

dilakukan uji *lagrange-multiplier (LM)* dengan hasil nilai *prob.* $0.0197 < 0,05$.

Tabel-3: Hasil Uji Chow & Lagrange Multiplier (LM)

Variabel Dependen	<i>prob.</i> Uji Chow	<i>prob.</i> Uji LM
PDRB	0,9993	0.0197

Sumber: diolah Penulis, Output Stata-17 (2024)

Merujuk kepada dua pengujian tersebut, maka model yang paling sesuai untuk digunakan dalam pengujian regresi data panel pada penelitian ini adalah *Random Effect Model (REM)*. Pemilihan model regresi *Random Effect Model (REM)* dinilai tepat tidak hanya secara statistik, namun juga secara intuitif, mengingat terdapat perbedaan yang mencolok dalam karakteristik serta sumber daya antar kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Hal ini sesuai dengan Bell & Jones (2015) yang menyatakan bahwa model *REM* paling tepat digunakan pada situasi data panel yang memiliki perbedaan mencolok antar kelompok.

Tabel-2: Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah	Rata-Rata	Std. Dev.	Min	Max
PDRB	544	0,0454	0,0024	0,2637	0,3011
PENDIDIKAN	544	361 Miliar	207 Miliar	55 Miliar	1.194 Miliar
KESEHATAN	544	207 Miliar	100 Miliar	40 Miliar	793 Miliar
SOSIAL	544	18 Miliar	11 Miliar	2 Miliar	120 Miliar

Sumber: diolah Penulis, Output Stata-17 (2024)

Selanjutnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya interaksi antar variabel independen, maka dilakukan uji multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa data pada penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas, dibuktikan dengan nilai hasil uji untuk seluruh variabel independen nilai $VIF < 10$ sementara nilai $1/VIF > 0.1$. Sehingga, pengujian dapat dilanjutkan dengan melakukan uji hipotesis dengan regresi data panel menggunakan *random effect model (REM)*.

Tabel-4: Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
COVID-19	3.13	0.3190
PENDIDIKAN	2.82	0.3548
KESEHATAN	1.37	0.7281
SOSIAL	1.05	0.9497

Sumber: diolah Penulis, Output Stata-17 (2024)

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan *random effect model (REM)* sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5, diketahui bahwa pada Persamaan 1, variabel independen Pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 136 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

Dampak negatif dari Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Regional di Pulau Sumatera salah satunya dikarenakan adanya Penerapan PSBB di Pulau Sumatera. Akibatnya, kebijakan tersebut menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga terjadi penurunan transaksi baik di sektor barang maupun jasa. Misalnya, dampak terhadap sektor Pariwisata di Padang, Sumatera Barat (Analia & Budiman, 2023). Selain itu, Khoirudin (2021) menemukan adanya penurunan ekonomi di Sumatera Selatan yang mencapai -0,11% pada tahun 2020. Sementara

penelitian Andrianus et al. (2021) menemukan adanya menurunnya pendapatan masyarakat di Sumatera Barat.

Tabel-5: Output Regresi Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Variabel Independen

Variabel	Persamaan 1	Persamaan 2
PDRB	Coeff.	Coeff.
COVID-19	-0,0234*	-0,4958*
SOSIAL	0,0147*	
COVID-19*SOSIAL		0,0201*
PENDIDIKAN	0,004	0,0038
KESEHATAN	-0,0029	-0,0028
Catatan: *Signifikan pada $p < 0,05$.		

Sumber: diolah Penulis, Output Stata-17 (2024)

Temuan ini sejalan dengan temuan dari Ashraf (2020), Zhang et al. (2021), Elnahass et al. (2021), Osterrieder et al. (2021) dan Wu et al. (2021) yang menemukan hasil yang sama. Selain itu, Iskar et al. (2021) dan Ridwan (2023) juga menemukan hal yang serupa dalam konteks Indonesia. Merujuk kepada hal tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan Pandemi Covid-19 berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam penelitian ini **diterima**.

Uji Regresi data panel dengan *random effect model (REM)* menunjukkan bahwa belanja perlindungan sosial mampu berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Sementara itu, belanja di bidang pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada hal tersebut, Persamaan 1 menunjukkan bahwa belanja kesehatan krusial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa sebelum dan pada saat pandemi. Di lain pihak, belanja pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan.

Hasil pengujian yang dilakukan dengan *random effect model* pada Persamaan 2 dilakukan untuk mengetahui pengaruh moderasi dari belanja perlindungan sosial terhadap hubungan antara Pandemi Covid-19 dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Hal tersebut akan menjawab pertanyaan apakah pembagian Bantuan Sosial, yang merupakan bagian dari Belanja

Perlindungan Sosial, relevan di Pulau Sumatera dalam kaitannya mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya selama Pandemi Covid-19. Tabel 5 memberikan gambaran mengenai hasil pengujian regresi, di mana sama seperti Persamaan 1, pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera pada persamaan 2 berpengaruh secara signifikan dan negatif. Sementara itu, dari tabel tersebut pula diketahui bahwa interaksi antara belanja perlindungan sosial dan pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan dan positif. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien yang positif sebesar 0,0201 dan signifikan pada tingkat 5%. Merujuk kepada hal tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Belanja Perlindungan Sosial pada APBD Kabupaten/Kota mampu memoderasi pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera pada penelitian ini **diterima**.

Hasil signifikan pengaruh belanja perlindungan sosial pada persamaan 1 dengan diperkuat interaksi antara belanja perlindungan sosial dan pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan dan positif pada persamaan 2, menandakan bahwa belanja perlindungan sosial merupakan *quasi moderator*. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel moderator belanja perlindungan sosial tidak hanya mampu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung, namun juga dapat mengurangi dampak negatif dari Pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di 136 Kabupate/Kota di Pulau Sumatera (Akhmadi et al., 2023)

Belanja perlindungan sosial dimaksudkan untuk menjaga masyarakat dari guncangan krisis, terutama bagi masyarakat yang rentan. Belanja perlindungan sosial ini diwujudkan dalam bentuk Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, Perlindungan Sosial Lainnya, dan Perlindungan Sosial di Masa Pandemi Covid-19. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat di masa krisis dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selain itu, belanja perlindungan sosial dalam bentuk uang maupun barang, dapat mengurangi dampak pandemi Covid-19, khususnya di bidang daya beli, menciptakan permintaan (An et al., 2023). Pemberian

uang tunai atau belanja pemerintah untuk menyediakan bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok, akan meningkatkan likuiditas di pasar (Albani et al., 2022). Pada akhirnya, akan mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan permintaan secara agregat. Hal ini akan mencegah kontraksi ekonomi lebih jauh.

Sementara itu, tidak signifikkannya pengaruh belanja kesehatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa Pandemi Covid-19 dapat disebabkan oleh beberapa hal. Li et al. (2021) menemukan bahwa kenaikan belanja kesehatan pada masa Pandemi lebih banyak ditujukan untuk menopang situasi gawat darurat kesehatan di masa pandemi. Hal ini menyebabkan kebijakan belanja kesehatan tidak dimaksudkan dalam rangka efisiensi pertumbuhan ekonomi, namun untuk mengatasi penyebaran penyakit yang masif (Vysochyna et al., 2023).

Selain itu, menurut Acharya et al. (2021), peningkatan biaya kesehatan biasanya bersifat reaktif. Hal ini untuk mengatasi krisis kesehatan dibandingkan untuk menghasilkan sistem kesehatan yang berkelanjutan. Akibatnya, sebagaimana ditemukan oleh Hartman et al. (2022), fokus dari peningkatan belanja kesehatan adalah untuk melakukan penyembuhan dan pencegahan wabah, bukan untuk mendorong sistem kesehatan yang menopang ekonomi dalam jangka panjang.

Hal yang sama juga ditemukan pada variabel belanja pendidikan. Ketika pandemi covid-19 secara otomatis proses belajar-mengajar secara klasikal terhenti. Akibatnya, belanja yang dikeluarkan lebih dipergunakan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian selama Pandemi, seperti tunjangan pulsa dan paket data bagi pendidik dan peserta didik (Sukmawati & Maryanti, 2021). Selain itu, tidak signifikkannya dampak belanja pendidikan pada penelitian ini diakibatkan karena biasanya hasil dari belanja pendidikan baru dirasakan dalam jangka panjang. Dengan gangguan berupa pandemi covid-19 yang menyebabkan *learning loss* serta waktu pengamatan yang tidak terlalu panjang, menyebabkan variabel belanja pendidikan tidak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di

136 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera (Haider et al., 2021).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di 136 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Selain itu, belanja kesehatan dan belanja pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional semasa Pandemi Covid-19. Di sisi lain, belanja perlindungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, ketika belanja perlindungan sosial berinteraksi dengan Pandemi Covid-19, menghasilkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa belanja Perlindungan Sosial bertindak sebagai *quasi moderator*. Merujuk kepada hal tersebut, maka bantuan sosial, sebagai komponen belanja perlindungan sosial, relevan sebagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari penelitian ini dapat dirumuskan beberapa rekomendasi. *Pertama*, melakukan penguatan belanja kesehatan, terutama ketika krisis seperti Pandemi Covid-19. *Mandatory spending* belanja kesehatan sebesar 10% telah diamanatkan dalam UU HKPD. Namun, merujuk pada data, secara rata-rata pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera masih belum memenuhi ketentuan tersebut. *Kedua*, pengaruh tidak signifikan belanja pendidikan tidak serta merta mengindikasikan perlunya pengurangan biaya pendidikan. Penelitian tentang dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang diperlukan, diiringi dengan bagaimana suatu krisis berdampak pada lanskap pendidikan suatu masyarakat, khususnya di era Pandemi Covid-19. *Terakhir*, hubungan yang signifikan belanja perlindungan sosial secara independen mengindikasikan bahwa belanja perlindungan sosial dapat secara langsung mendorong

pertumbuhan ekonomi. Efek moderasi belanja perlindungan sosial, mengindikasikan belanja tersebut sangat diperlukan, terutama ketika krisis seperti Pandemi Covid-19. Adanya bantuan tunai dan barang kebutuhan pokok menjadi jaring pengaman bagi masyarakat yang rentan terhadap krisis.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu *pertama* terkait dengan data dan jangka waktu penelitian. Penelitian ini hanya terbatas pada dua tahun sebelum dan dua tahun selama Pandemi Covid-19. Bagaimana belanja Bansos dan dampak krisis dalam jangka panjang perlu penelitian lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini tidak mempertimbangkan semua variabel kontrol yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti faktor demografi, infrastruktur, atau kondisi politik di daerah. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk menanggulangi risiko bias dalam hasil penelitian, karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor selain belanja pemerintah dan krisis, seperti Pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajami, R. A. (2020). Economic Challenges and Adjustments for the Asia-Pacific Region: COVID-19 and Beyond. *Journal of Asia-Pacific Business*, 21(3), 165–168.
<https://doi.org/10.1080/10599231.2020.1783970>
- Akhmadi, M. H., Sumardjoko, I., & Sumantri, J. (2023). The Role of Government Expenditure on Regional Economic Resilience During Pandemic Covid-19. *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK*, 7(1), 74–89.
<https://doi.org/10.31092/jmkp.v7i1.2568>
- Akita, T., & Alisjahbana, A. S. (2023). The Initial Impacts of the COVID-19 Pandemic on Regional Economies in Indonesia: Structural Changes and Regional Income Inequality. *Sustainability*, 15(18), 13709.
<https://doi.org/10.3390/su151813709>
- Albani, V. V. L., Albani, R. A. S., Bobko, N., Massad, E., & Zubelli, J. P. (2022). On the role of financial support programs in mitigating the SARS-CoV-2 spread in Brazil. *BMC Public Health*, 22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-022-14155-z>
- An, B. Y., Porcher, S., Tang, S.-Y., & Maille-Lefranc, O. (2023). COVID-19 emergency policies, financial security, and social equity: Worldwide evidence. *Public Administration Review*, 83(5), 1300–1318.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.13652>
- Analia, D., & Budiman, C. (2023). *Identification aspects of COVID-19 adaptive tourism sustainability in Padang City, West Sumatera*. 100002. <https://doi.org/10.1063/5.0128127>
- Anderson, R. M., Heesterbeek, H., Klinkenberg, D., & Hollingsworth, T. D. (2020). How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic? *The Lancet*, 395(10228), 931–934.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30567-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30567-5)
- Andiojaya, A., Nefriana, R. R., Rizka, R., & Lestari, T. K. (2022). GRDP forecasting through night-time light data: Evidence from Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 8(01), 1–10.
<https://doi.org/10.22219/jiko.v8i01.20239>
- Andrianus, F., Handra, H., Sukma, A., & Alfatih, K. (2021). THE IMPACT OF THE PANDEMIC CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) ON HOUSEHOLD WELFARE IN WEST SUMATERA. *Menara Ilmu*, 15(1).
<https://doi.org/10.31869/mi.v15i1.2502>
- Ashraf, B. N. (2020). Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial markets. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 27, 100371.
<https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371>
- Bell, A., & Jones, K. (2015). Explaining Fixed Effects: Random Effects Modeling of Time-Series Cross-Sectional and Panel Data. *Political Science Research and Methods*, 3(1), 133–153.
<https://doi.org/10.1017/psrm.2014.7>
- Coccia, M., & Benati, I. (2023). *HOW HEALTHCARE EXPENDITURES AFFECT COVID-19 FATALITY RATE ACROSS EUROPEAN COUNTRIES?*
<https://doi.org/https://doi.org/10.1101/2023.06.23.23291808>

- Ditya, Y. C., Adrianto, L., Dahuri, R., & Susilo, S. B. (2017). ANALISIS EKONOMI-EKOLOGI UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA BERKELANJUTAN DI WILAYAH PESISIR PROVINSI BANTEN. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 7(2), 127. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v7i2.5680>
- Dube, K., Nhamo, G., & Chikodzi, D. (2021). COVID-19 cripples global restaurant and hospitality industry. *Current Issues in Tourism*, 24(11), 1487–1490. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1773416>
- Ferdiansah, R. (2022). The Impact of Household Consumption and Investment on Economic Growth. *American Journal of Economic and Management Business (AJEMB)*, 1(2), 61–66. <https://doi.org/10.58631/ajemb.v1i2.8>
- Haider, S. A., Gul, A., Anwar, B., Tehseen, S., & Iqbal, S. (2021). *The Impacts of the COVID-19 Outbreak on the Education Sector* (pp. 311–328). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7164-4.ch018>
- Hartman, M., Martin, A. B., Washington, B., Catlin, A., & The National Health Expenditure Accounts Team. (2022). National Health Care Spending In 2020: Growth Driven By Federal Spending In Response To The COVID-19 Pandemic. *Health Affairs*, 41(1), 13–25. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2021.01763>
- Iskar, I. W. P., Akbar, A. F., Dozan, W., & Yudiansyah, A. M. (2021). DAMPAK PENERAPAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) TERHADAP PENGHIDUPAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI PROVINSI DKI JAKARTA. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 68–79. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v3i2.1001>
- Järnberg, L. A., & Värja, E. (2023). The composition of local government expenditure and income growth: the case of Sweden. *Regional Studies*, 9, 1784–1797. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2131755>
- Juwita, R. (2023a). Analysis of Social Assistance and Provincial Unexpected Expenditure in Indonesia Before and After COVID-19 (Time Series Analysis: 2019 – 2021). *JOURNAL OF ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT STUDIES*, 06(04). <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i4-02>
- Juwita, R. (2023b). Analysis of Social Assistance and Provincial Unexpected Expenditure in Indonesia Before and After COVID-19 (Time Series Analysis: 2019 – 2021). *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 6(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i4-02>
- Khoirudin, A. (2021). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. *IQTISHADUNA*, 4(1), 532–541. <https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v6i1.426>
- Kim, D. (2021). Financial hardship and social assistance as determinants of mental health and food and housing insecurity during the COVID-19 pandemic in the United States. *SSM - Population Health*, 16, 100862. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100862>
- Kustanto, A. (2020). PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI INDONESIA: PERAN INFRASTRUKTUR, MODAL MANUSIA DAN KETERBUKAAN PERDAGANGAN. *Buletin Studi Ekonomi*, 80. <https://doi.org/10.24843/BSE.2020.v25.i01.p05>
- Li, X., Chen, F., & Hu, S. (2021). Spatial Spillover Effect of Government Public Health Spending on Regional Economic Growth during the COVID-19 Pandemic: An Evidence from China. *Complexity*, 2021(1). <https://doi.org/10.1155/2021/5552552>
- Lind, J., Roelen, K., & Sabates-Wheeler, R. (2021). Social Protection, COVID-19, and Building Back Better. *IDS Bulletin*, 52(1). <https://doi.org/10.19088/1968-2021.105>
- Liyushiana, Sibarani, R., Purwoko, A., & Emrizal. (2022). The Contribution of the Tourism Sector to the Regional Spatial Economy During the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(8), 2531–2536. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170821>
- Lustig, N., Pabon, V. M., Neidhöfer, G., & Tommasi, M. (2023). Short and Long-Run Distributional Impacts of COVID-19 in Latin America.

- Economía*, 22(1), 96–116.
<https://doi.org/10.31389/eco.3>
- Ma, G., & Mao, J. (2018). Fiscal Decentralisation and Local Economic Growth: Evidence from a Fiscal Reform in China. *Fiscal Studies*, 39(1), 159–187.
<https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2017.12148>
- Nguyen, L., & Bui, M. (2022). Social protection response to COVID-19: Experiences and lessons from Vietnam. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 32(4), 278–293.
<https://doi.org/10.1080/02185385.2022.2140703>
- Osabohien, R., Ashraf, J., De Alwis, T., Ufua, D. E., Osabuohien, E., Odularu, G., Noman, A., & Augustine, D. (2022). Social protection and food security nexus in the Global South: empirical evidence from West Africa. *Contemporary Social Science*, 17(2), 129–142.
<https://doi.org/10.1080/21582041.2021.2005125>
- Pangaribowo, D., Rosalia, F., Mukhlis, M., Novriansyah, M. F., & Poniasih, N. K. (2022). The Effectiveness of the Indonesian Government's Economic Stimulus Policy during the Covid-19 Pandemic. *Journal Public Policy*, 8(1), 36.
<https://doi.org/10.35308/jpp.v8i1.4048>
- Pradesha, A., Amaliah, S., Noegroho, A., & Thurlow, J. (2020). *The cost of COVID-19 on the Indonesian economy: A Social Accounting Matrix (SAM) multiplier approach*.
<https://doi.org/10.2499/p15738coll2.133789>
- Puji Lestari, F. A., & Yolanda, Y. (2022). The Effect of Economic Growth, Poverty and Wages On Tax Revenue. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2(11), 2295–2306.
<https://doi.org/10.36418/eduvest.v2i11.644>
- Putri, H. A., Gamayuni, R. R., Dharma, F., & Dharma, F. (2023). Financial Performance of Local Governments Before and After Refocusing and Budget Reallocation Policy for Handling Covid-19 In Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 21(1), 37–47.
<https://doi.org/10.24167/jab.v21i1.10020>
- Ridwan, R. (2023). Impact of large-scale social restriction policy on the economy in Depok City, West Java province. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1291.
<https://doi.org/10.29210/020232235>
- Sofi, I., Sakti, M. P., Bachtiar, A., & Nugraha, S. P. (2022). Implementation of Regional PEN Loans and Their Impact on The Absorption of Labor in The Regions. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(1), 1–22.
<https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss1.art142>
- Sukmawati, D., & Maryanti, R. (2021). Development of Education and Economic Circulation in Supporting Local Potential as Community Empowerment Efforts Amid the Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(2), 235–250.
<https://doi.org/10.17509/ijomr.v1i2.37598>
- Sumadi, P. (2023). Social Protection in Indonesia: Reforming Opportunities during Covid-19 Pandemic. *ASEAN Social Work Journal*, 11(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.58671/aswj.v11i1.41>
- Syahputra, R. A., Erlina, & Rujiman. (2023). The impact of education, social, and healthcare expenditures on the human development index (HDI) in Bireuen Regency. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 4(3), 592–597.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54660/IJMRGE.2023.4.3.592-597>
- Vysochyna, A., Vasylieva, T., Dluhopolskyi, O., Marczuk, M., Grytsyshen, D., Yunger, V., & Sulimierska, A. (2023). Impact of Coronavirus Disease COVID-19 on the Relationship between Healthcare Expenditures and Sustainable Economic Growth. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 3049.
<https://doi.org/10.3390/ijerph20043049>
- Wu, F., Liu, G., Guo, N., Li, Z., & Deng, X. (2021). The impact of COVID-19 on China's regional economies and industries. *Journal of Geographical Sciences*, 31(4), 565–583.
<https://doi.org/10.1007/s11442-021-1859-3>
- Yushkov, A. O., & Alexeev, M. V. (2021). The fiscal impact of the COVID-19 pandemic on the Russian regions: An overview of federal support

measures. *Journal of the New Economic Association*, 51(3), 232–242.
<https://doi.org/10.31737/2221-2264-2021-51-3-13>

Zhang, H., Ding, Y., & Li, J. (2021). Impact of the COVID-19 Pandemic on Economic Sentiment: A Cross-Country Study. *Emerging Markets Finance and Trade*, 57(6), 1603–1612.
<https://doi.org/10.1080/1540496X.2021.1897005>

Zweig, S. A., Zapf, A. J., Xu, H., Li, Q., Agarwal, S., Labrique, A. B., & Peters, D. H. (2021). Impact of Public Health and Social Measures on the COVID-19 Pandemic in the United States and Other Countries: Descriptive Analysis. *JMIR Public Health and Surveillance*, 7(6), e27917.
<https://doi.org/10.2196/27917>